

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Dengan kewenangan tersebut, maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah). Setiap daerah diberikan keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam mengurus sendiri rumah tangganya dan sebagai gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengenali sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah dituntut mampu memaksimalkan dan merealisasikan setiap perencanaan secara sistematis sehingga dapat menggenjot sumber pendapatan yang lebih besar guna meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dengan demikian efektifitas pendapatan asli daerah bisa tercapai dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat secara berangsur-angsur bisa dikurangi.

Berikut rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung (2012-2016)

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	933,920,994,572.00	1,005,583,424,429.00	107,67%
2	2013	1,407,759,106,133.00	1,442,775,238,323.00	102,49%
3	2014	1,808,509,055,075.00	1,716,057,298,378.00	94,89%
4	2015	2,066,246,830,526.00	1,859,694,643,505.00	90,00%
5	2016	2,767,404,903,364.00	2,152,102,355,197.00	77,76%

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran BPKA Kota Bandung Tahun 2017

Dari data di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset belum efektif, salah satu pemicunya adalah terjadi kebocoran-kebocoran serta mekanisme dan manajemen pemungutan pajak yang bermasalah sehingga target tidak terkejar.

Tabel 1.2
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung (2012-2016)

Tahun	Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pendapatan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2012	820,563,651,111.00	78,649,880,372.00	7,227,067,446.00	99,142,825,500.00
2013	1,194,087,447,016.00	115,508,351,284.00	12,069,972,667.00	121,109,467,356.00
2014	1,399,598,856,917.00	99,192,319,387.00	9,356,757,469.00	207,909,364,605.00
2015	1,494,147,377,053.00	64,985,847,830.00	8,602,757,430.00	291,958,661,192.00
2016	1,720,491,187,627.00	92,165,134,000.00	10,658,411,624.00	328,787,621,946.00

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran BPKA Kota Bandung Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dari pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak diduga menjadi penyebab rendahnya pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Tabel 1.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2012	1,005,583,424,429.00	3,666,693,409,600.00	27.42
2013	1,442,775,238,323.00	4,332,088,946,776.00	33.30
2014	1,716,057,298,378.00	4,953,940,629,444.00	34.64
2015	1,859,694,643,505.00	5,098,071,916,848.00	36.47
2016	2,152,102,355,197.00	5,684,560,510,164.00	37.85
Rata-rata	1,635,242,591,966.40	4,747,071,082,566.40	33.94

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKA Kota Bandung Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 bisa dilihat bahwa dari perhitungan akhir rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2012 hingga 2016, tingkat kemandirian daerah rata-rata keseluruhan 33,94% (rendah 25-50%) menurut Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih besar dalam melakukan belanja daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pada hasil observasi awal peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Bagian Sub Akuntansi BPKA Kota Bandung yaitu Bapak Eko Setyono serta berdasarkan data yang ada, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan dalam pencapaian target yang ditentukan, hal ini diduga karena adanya ketidaksesuaian penetapan target Pendapatan Asli Daerah dengan kemampuan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang berubah-ubah.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.
3. Penerimaan pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir hanya berkontribusi sebesar 33,94% dari pendapatan daerah yang ada, sehingga kemandirian daerahnya masih rendah.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG TAHUN 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan pengelola keuangan otonomi daerah khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan dalam pencapaian target yang ditentukan, hal ini diduga karena adanya ketidaksesuaian penetapan target Pendapatan Asli Daerah dengan kemampuan daerah.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya.
3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, hal ini bisa terlihat dari rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir, pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 33,94% dari pendapatan daerah yang ada.
4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung belum efektif sehingga bisa dikatakan kinerja pemerintah daerahnya masih belum optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Seberapa besar Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada BPKA Kota Bandung Tahun 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di BPKA Kota Bandung Tahun 2012-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Untuk mengembangkan teori-teori, umumnya mengenai teori Administrasi Publik dan Administrasi Keuangan, khususnya tentang teori Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan teori Kinerja Keuangan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk mengembangkan konsep ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan, dan dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan teori-teori ilmu Administrasi Publik.
- c. Bagi instansi BPKA Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam hal Kinerja Keuangan Daerah.

- d. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan gagasan untuk membuat penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini dalam kaitan yang lebih luas.

F. Kerangka Berpikir

Efektivitas kerja menurut Dharma (2001:154) merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Adapun dimensi-dimensinya adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas merupakan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
2. Kualitas merupakan mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya).
3. Ketepatan waktu merupakan sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

“Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.”

Mohamad Mahsun (2014:25), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Mohamad Mahsun (2012:196) indikator kinerja keuangan daerah meliputi:

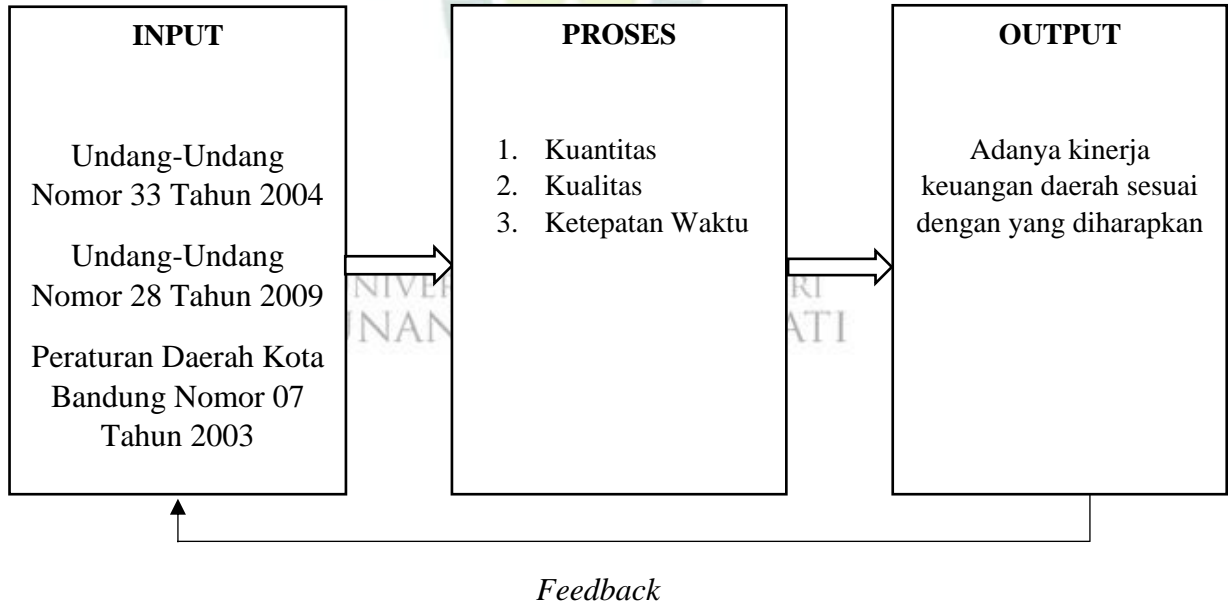
1. Indikator Masukan (*Input*)
2. Indikator Proses (*Process*)
3. Indikator Keluaran (*Output*)

4. Indikator Hasil (*Outcome*)
5. Indikator Manfaat (*Benefit*)
6. Indikator Impact

Teori hubungan menggunakan teori Ihya Ulum (2009:31) yang menyatakan bahwa:

“Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitasnya maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel, maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Skema Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2017

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyatakan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut: Adanya pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2012-2016 berdasarkan Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan Waktu.

